

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sukriy dan Abdul Halim. 2006. Studi Atas Belanja Modal Pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol.2 No.2 November 2006
- Al Haryono Jusup. 2005. Teori Akuntansi, Edisi Keenam Jilid Satu, STIE YKPN, Yogyakarta.
- Atyanta, Ramya.2012. Analisis Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten X di Jawa Timur)
- Bastian, Indra.2006. Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar. Jakarta : Erlangga.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2011. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011
- Halim, Abdul.2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat.
- Insani, Istyadi.2009. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah dalam Rangka Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta
- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Lembaga Administrasi Negara dan BPKP.2000. Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara
- Mardiasmo.2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Mardiasmo.2005. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Akrual)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Perubahan Pertama Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
- Peter Salim, 1987 *The Contemporary English-Indonesia Dictionary*, Jakarta: Modern English Press, Edisi Ketiga
- Rasul, Syahrudin, 2003. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta: PNRI
- Rosjidi.2001. *Akuntansi Sektor Publik Pemerintah : Kerangka, Stanadar dan Metode*. Surabaya. Aksara Satu
- Sadjiarto, Arja. 2000. *Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan*. Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol.2, No.2, November 2000 : 138-150
- Sekaran, Uma.2006. *Research Methods For Business*. Jakarta Salemba Empat
- Sembiring, Sri.2009. *Analisis Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pemeliharaan dalam realisasi Anggaran Pemerintahan dalam Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara*. Tesis USU
- Suherman Toha, 2007, *Penelitian Masalah Hukum tentang Penerapan Good Corporate Governance Pada Dunia Usaha*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Barang Milik Negara/Daerah

